

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH INDUK DENGAN PEMERINTAH DAERAH PEMEKARAN (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH ACEH TENGAH DAN PEMERINTAH DAERAH BENER MERIAH TAHUN 2015-2019)

Umar Said Meldego¹, Suparno^{*2}

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: saidumar453@gmail.com¹, suparno.feakt@unsyiah.ac.id^{*2}

* Corresponding Author

Abstract

The purpose of this study is to analyze financial performance using the independently ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and dependency ratio between the regional governments of Central Aceh and Bener Meriah in 2015-2019. This type of research is descriptive quantitative using the ratio analysis method. This study uses LKPD data obtained from the BPK Aceh office. The results showed that the ratio of the independence of the Central Aceh and Bener Meriah regencys was at a very low level. The effectiveness ratio of the regional government of Aceh Tengah has the criteria of Moderately Effective, while the regional government of Bener Meriah has the criteria of Less Effective. The efficiency ratios of the Aceh Tengah and Bener Meriah regencys fall into the Efficient criteria. The dependency ratio of Aceh Tengah and Bener Meriah regencys is classified into very high criteria. The results of different tests indicate that there are differences in financial performance at the level of independence of the Central Aceh region and are truly festive.

Keywords: *Financial performance, Independently Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio and Dependency Ratio*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana sekaligus penanggung jawab dari berbagai urusan pemerintahan berdasarkan aturan otonomi dan prinsip-prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi dari pemerintah daerah ialah mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya daerah serta perimbangan keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan sistem keuangan yang baik.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam hal untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Pengukuran kinerja keuangan juga dapat digunakan sebagai perbandingan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya (Adhiantoko, 2013). Salah satu alat yang dapat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah ialah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Pememerintah daerah (LKPD) yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan (Mahmudi, 2011:169 ; Wulandari, 2001:20).

Halim (2007) menyatakan bahwa salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk: (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; (3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan (5)Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan

dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah, yaitu pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah. Salah satu tujuan pemekaran daerah, yaitu pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah. Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan) yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pendekatan semacam ini dapat dianggap kurang tepat bila tidak ada pembanding yang setara. Di samping itu, perbandingan dapat dilakukan antara daerah induk dan pemekaran sehingga dapat dilihat bagaimana dampak yang terjadi di kedua daerah tersebut setelah pemekaran.

Penelitian tentang kinerja daerah induk dengan daerah pemekaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi hasil penelitiannya belum konsisten, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yefirson, R.M., dan Nasir, M. (2015) menjelaskan bahwa rata-rata Indikator Kinerja Keuangan (IKK) kabupaten induk pada provinsi Sumatra Barat sebesar 32,44 dan rata-rata IKK kabupaten pemekarannya sebesar 35,20. Hasil uji beda t menunjukkan tidak ada perbedaan IKK kabupaten induk dan IKK kabupaten pemekarannya

Penelitian lain dilakukan oleh Ichwan, et.al (2015) tentang kinerja keuangan kabupaten induk Aceh Utara dengan kabupaten pemekaran Kota Lhokseumawe, dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan periode sebelum dan sesudah adanya pemekaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Endaryanto (2018) menunjukkan hal yang berbeda, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja ekonomi dan keuangan daerah di kabupaten

pemekaran pada provinsi Lampung lebih tinggi dibandingkan di kabupaten induk. Indikator penurunan angka kemiskinan adalah indikator yang paling signifikan mendongkrak kinerja ekonomi di kabupaten pemekaran. Kinerja keuangan kabupaten pemekaran yang tinggi dibandingkan kabupaten induk didorong oleh indikator turunnya ketergantungan fiskal, penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah. Kinerja ekonomi daerah dipengaruhi oleh pangsa pertanian, ukuran wilayah, pendidikan, kesehatan, transfer pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bener Meriah sebagai kabupaten pemekaran. Pemilihan lokasi penelitian di kedua kabupaten ini dikarenakan kedua kabupaten ini memiliki sumber PAD yang relatif sama, sehingga peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja di kedua kabupaten tersebut yang merupakan kabupaten induk dan kabupaten pemekaran.

2. KERANGKA TEORITIS

Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum Pasal 156 ayat (1) dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah segala kewajiban dan hak pemerintah daerah yang dapat diukur uang dan semua barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua kekayaan pemerintah daerah seperti sumberdaya alam dan aset selama belum dimiliki oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah

daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan bahwa kegiatan keuangan pemerintah daerah menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan dan menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan ialah segala jenis penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam satu periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak milik Pemda.

2. Belanja

Belanja ialah segala pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam satu periode tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ialah hasil/output dari kegiatan ataupun rencana yang akan telah dicapai selama satu kali periode dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai manfaat atas kewajiban yang telah berikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010). Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data dari anggaran, informasi ekonomi, maupun informasi keuangan (Zafra-Gomez, Et.al 2009). Kinerja keuangan merupakan alat ukur yang baik dalam menilai kinerja manajemen pemerintah lokal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.

Mahmudi (2010) menjelaskan kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu untuk dianalisis agar dapat memberikan gambaran dari kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berguna untuk mengetahui tingkat kesehatan struktur keuangan, dan tingkat kemandirian suatu daerah dengan melihat kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan daerah dibanding dengan kewajiban pemerintah dalam membiayai belanja daerah.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat atau metode yang digunakan untuk mencatat dan menilai suatu pencapaian dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan sasaran, strategi, dan sasaran (Harsonowati, 2013). Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang dapat digunakan manajemen publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial juga nonfinansial. Elemen pokok pengukuran kinerja (Mahsun, 2006) yaitu:

1. Menentukan tujuan, sasaran, dan strategi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Evaluasi Kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi yang dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan murah. Pengukuran kinerja keuangan daerah penting untuk dapat menilai transparansi dan akuntabilitas ataupun pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim dan Kusufi, 2012).

Ukuran Kinerja Keuangan Daerah

Analisis keuangan merupakan kegiatan mengidentifikasi kriteria keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan pada LKPD dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan antara tahun satu dengan tahun lainnya atau membandingkan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana berbanding posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Halim 2007).

Beberapa rasio yang dapat digunakan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio ketergantungan, (Halim, 2007).

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan realisasi rill daerah.

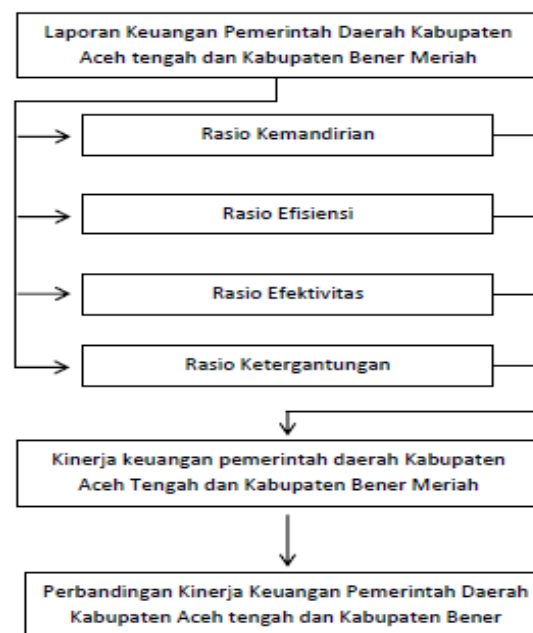
3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan ataupun menjelaskan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen.

4. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, (Mahmudi, 2010).

Pengembangan Hipotesis



3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:54) Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan ukuran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat juga hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran dan Bougie, 2017:158).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2015-2019.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data tersebut meliputi: Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pendapatan Transfer.

Operasional Variabel

Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provisi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1 Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25,01-50%	Konsultatif
Sedang	50,01-75%	Partisipatif
Tinggi	75,01-100%	Delegatif

Sumber : Halim (2007:232)

Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Tingkat Efektifitas Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber : Mahmudi (2010)

Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Tingkat Efisiensi Daerah

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007)

Rasio Ketergantungan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Tingkat Ketergantungan Daerah

Persentase Ketergantungan	Kriteria Ketergantungan
0.00 – 10.00	Sangat Rendah
10.01 – 20.00	Rendah
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Tinggi
>50.00	Sangat Tinggi

Sumber : Bisma & Susanto (2010)

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian tentang perbedaan tingkat kemandirian pemerintah daerah, tingkat efektivitas pemerintah daerah, tingkat efisiensi pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini mencakup statistik deskriptif, dan uji normalitas.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016).

Uji Analisis Data

Uji Normalitas Data

Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov test.

Uji Beda (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Independent Sample t-test* untuk menguji perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah induk dan pemerintah daerah pemekaran.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian

Tabel 5. Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian		
	Aceh Tengah	Bener Meriah	Kemampuan Keuangan
2015	13%	7%	Rendah Sekali
2016	11%	7%	Rendah Sekali
2017	12%	8%	Rendah Sekali
2018	13%	8%	Rendah Sekali
2019	14%	9%	Rendah Sekali

Sumber: Data Diolah

Rasio kemandirian Kabupaten Aceh Tengah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 14%, sedangkan terendah pada tahun 2016 sebesar 11%. Untuk Kabupaten Bener Meriah rasio tertinggi pada tahun 2017, dan 2018 yaitu sebesar 8%, sedangkan rasio terendah pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 7%. Tingkat kemampuan keuangan daerah masing-masing Kabupaten berada pada tingkatan rendah sekali.

Analisis Rasio Efektivitas

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Rasio Efektivitas			
	Aceh Tengah	Kriteria	Bener Meriah	Kriteria
2015	108%	Sangat Efektif	91%	Cukup Efektif
2016	85%	Kurang Efektif	77%	Kurang Efektif
2017	93%	Cukup Efektif	69%	Tidak Efektif
2018	82%	Kurang Efektif	55%	Tidak Efektif
2019	96%	Cukup Efektif	92%	Cukup Efektif
Rata-rata	93%	Cukup Efektif	77%	Kurang Efektif

Rasio efektivitas daerah Kabupaten Aceh Tengah tertinggi pada tahun 2015 sebesar 108% dengan kategori Sangat Efektif, sedangkan terendah pada tahun 2018 dengan kategori Kurang Efektif. Untuk rasio efektivitas daerah Kabupaten Bener Meriah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 92% dengan kategori Cukup Efektif, sedangkan terendah pada tahun 2018 dengan kategori Tidak Efektif. Secara keseluruhan rasio efektivitas Kabupaten Aceh Tengah memiliki kriteria Cukup Efektif, sedangkan Kabupaten Bener Meriah memiliki kriteria Kurang Efektif.

Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi			
	Aceh Tengah	Kriteria	Bener Meriah	Kriteria
2015	86%	Cukup Efisien	89%	Cukup Efisien
2016	89%	Cukup Efisien	82%	Cukup Efisien
2017	80%	Cukup Efisien	78%	Efisien
2018	59%	Sangat Efisien	76%	Efisien
2019	79%	Efisien	77%	Efisien
Rata-rata	79%	Efisien	80%	Efisien

Sumber: Data Diolah

Rasio efisiensi daerah Kabupaten Aceh Tengah tertinggi pada tahun 2016 sebesar 89% dengan kategori Cukup Efisien, sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar 59% dengan kategori Sangat Efisien. Untuk rasio efisiensi daerah Kabupaten Bener Meriah tertinggi pada tahun 2015 sebesar 89% dengan kategori Cukup Efisien, sedangkan terendah pada tahun 2018 dengan kategori Efisien. Secara keseluruhan rasio Efisiensi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah memiliki kriteria Efisien.

Analisis Rasio Ketergantungan

Tabel 8. Perhitungan Rasio Ketergantungan

Tahun	Rasio Ketergantungan Daerah			
	Aceh Tengah	Kriteria	Bener Meriah	Kriteria
2015	84%	Sangat Tinggi	92%	Sangat Tinggi
2016	89%	Sangat Tinggi	93%	Sangat Tinggi
2017	89%	Sangat Tinggi	91%	Sangat Tinggi
2018	66%	Sangat Tinggi	90%	Sangat Tinggi
2019	86%	Sangat Tinggi	89%	Sangat Tinggi
Rata-rata	79%	Sangat Tinggi	88%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Diolah

Rasio ketergantungan daerah Kabupaten Aceh Tengah tertinggi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 89% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar 66% dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk rasio ketergantungan daerah Kabupaten Bener Meriah tertinggi pada tahun 2016 sebesar 93% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan terendah pada tahun 2019 sebesar 89% dengan kategori Sangat Tinggi. Secara keseluruhan rasio ketergantungan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah memiliki kriteria Sangat Tinggi.

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten aceh tengah memiliki nilai rasio kemandirian dengan signifikansi sebesar 0,200, rasio efektivitas sebesar 0,200, dan rasio efisiensi sebesar 0,121. Hal ini menunjukkan data berdistribusi normal. Rasio ketergantungan daerah kabupaten Aceh tengah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045, maka disimpulkan data berdistribusi tidak normal.

Hasil Uji Normalitas Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah memiliki nilai rasio kemandirian dengan signifikansi sebesar 0,161 , rasio efektivitas sebesar 0,200 , rasio efisiensi sebesar 0,200 dan rasio ketergantungan daerah sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan data berdistribusi normal.

Uji Beda (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Independen T-Test Rasio Kemandirian

		Sig (2-tailed)
Rasio	Equal variances assumed	0,00
	Equal variances not assumed	0,00

Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis bahwa nilai t sig lebih kecil dibandingkan dengan nilai α 0,05, maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan tingkat kemandirian antara kinerja pemerintah daerah induk dan pemeritah daerah pemekaran tahun 2015-2019. Rasio kemandirian kabupaten aceh tengah dan kabupaten bener meriah memiliki perbedaan kinerja keuangan meskipun tingkat kemandirian kedua pemerintah tersebut sama.

Tabel 10. Hasil Uji Independen T-Test Rasio Efektivitas

		Sig (2-tailed)
Rasio	Equal variances assumed	0,091
	Equal variances not assumed	0,097

Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis bahwa nilai t sig lebih besar dibandingkan dengan nilai α 0,05, maka dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara kinerja pemerintah daerah induk dan pemeritah daerah pemekaran tahun 2015-2019.

Tabel 11. Hasil Uji Independen T-Test Rasio Efisiensi

		Sig (2-tailed)
Rasio	Equal variances assumed	0,762
	Equal variances not assumed	0,766

Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis bahwa nilai t sig lebih besar dibandingkan dengan nilai α 0,05, maka dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara kinerja pemerintah daerah induk dan pemeritah daerah pemekaran tahun 2015-2019.

Tabel 12. Hasil Uji Independen T-Test Rasio Ketergantungan

		Sig (2-tailed)
Rasio	Equal variances assumed	0,097
	Equal variances not assumed	0,130

Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis bahwa nilai t sig lebih besar dibandingkan dengan nilai α 0,05 maka dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan tingkat ketergantungan antara kinerja pemerintah daerah induk dan pemeritah daerah pemekaran tahun 2015-2019.

Pembahasan

Rasio Kemandirian

Kabupaten Aceh Tengah belum mampu menggali potensi pendapatan asli daerahnya terutama pada pendapatan retribusi daerah, dimana pemerintah daerah hanya dapat merealisasikan pendapatan tersebut dengan rata-rata 54% pertahun dari target pendapatan yang sudah dianggarkan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya pendapatan retribusi contohnya seperti rumah pelelangan dan pelayanan pasar. Rendahnya retribusi rumah pelelangan disebabkan oleh banyaknya hasil bumi atau komodi yang sudah menjadi barang jadi atau olahan sehingga tidak dimasukkan ketempat pelelangan dan banyak hasil bumi yang dibawa keluar daerah tidak melalui pos retribusi. Rendahnya retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh kurangnya pungutan oleh petugas yang merupakan imbas dari pembongkaran pasar terbesar yang ada di kabupaten aceh tengah. Kabupaten Bener Meriah belum mampu menggali potensi pendapatan asli daerahnya terutama pada pendapatan retribusi daerah, dimana pemerintah hanya dapat merealisasikan pendapatan tersebut dengan rata-rata 56% pertahun dalam kurun waktu 2015-2019 dari target pendapatan yang sudah dianggarkan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya pendapatan retribusi contohnya seperti pelayanan pasar dan terminal. Rendahnya retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pasar yang memadai, tersebarnya pasar-pasar di daerah, dan kurangnya petugas serta kewajiban wajib retribusi. Rendahnya retribusi terminal disebabkan oleh lokasi terminal yang berada jauh dari pemukiman warga, susah diakses, dan banyak transportasi yang tidak melakukan pemberhentian di terminal untuk melakukan retribusi. Dari kedua kabupaten tersebut terdapat sumber yang sama yang menjadi faktor rendahnya pendapatan retribusi, yaitu pelayanan pasar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Ramadayani, R. (2018) yang menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, dimana realisasi pendapatan retribusi menjadi salah satu target pendapatan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas

Tingkat efektivitas kabupaten Aceh Tengah termasuk kedalam kategori cukup efektif, dikarenakan pemerintah daerah Aceh Tengah belum mampu merealisasikan beberapa sumber pendapatan asli daerah mereka secara maksimal ataupun mencapai persentase 100%, seperti rata-rata pendapatan retribusi selama lima tahun hanya mencapai 54% dan pendapatan lain-lain PAD yang sah selama lima tahun hanya mencapai hanya 94%. Pendapatan retribusi pada sektor retribusi pariwisata sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten aceh tengah. Tingkat efektivitas kabupaten Bener Meriah termasuk kedalam kategori kurang efektif, dikarenakan pemerintah daerah Bener Meriah belum dapat merealisasikan beberapa sumber pendapatan asli daerah mereka secara maksimal ataupun mencapai persentase 100%. Rata-rata pendapatan asli daerah selama lima tahun seperti pendapatan pajak daerah hanya mencapai 80%, pendapatan retribusi hanya mencapai 56%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai 98%, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah hanya mencapai hanya 77% berdasarkan target pendapatan yang sudah dianggarkan. Pendapatan pajak daerah yang cukup penting dalam sumber pendapatan asli daerah kabupaten bener meriah ialah pajak restoran. Pendapatan pajak restoran masih rendah dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran dari pemilik restoran, tidak adanya sanksi dari pihak yang berwenang, dan lambatnya kinerja pihak terkait dalam mengatasi permasalahan pajak restoran. Pendapatan pajak menjadi faktor yang membedakan kinerja pendapatan asli daerah antara kabupaten aceh tengah dan kabupaten bener meriah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Ramadayani, R. (2018) yang menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Rafni (2019) dalam hasil penelitiannya bahwa pendapatan retribusi pada sektor pariwisata juga termasuk kedalam faktor yang penting dalam merealisasikan pendapatan retribusi daerah.

Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi pada kabupaten Aceh Tengah tergolong kedalam kriteria efisien dikarenakan tidak ada perubahan yang signifikan pada setiap tahunnya. Pemerintah daerah sudah dapat merealisasikan pendapatan daerahnya lebih besar dari total belanja yang mereka keluarkan. Realisasi pendapatan daerah sudah dikelola dengan baik, dengan rata-rata pendapatan daerah selama lima tahun seperti pendapatan asli daerah sebesar 92%, pendapatan transfer sebesar 97%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 100% berdasarkan pada anggaran yang sudah ditetapkan. Tingkat efisiensi pada kabupaten Bener Meriah tergolong kedalam kriteria efisien dikarenakan tidak ada perubahan yang signifikan pada setiap tahunnya. Pemerintah daerah sudah dapat merealisasikan pendapatan daerahnya lebih besar dari total belanja yang mereka keluarkan. Realisasi pendapatan daerah sudah dikelola dengan baik, dengan rata-rata pendapatan daerah selama lima tahun seperti pendapatan asli daerah sebesar 77%, pendapatan transfer sebesar 97%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 92% berdasarkan pada anggaran yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Rempowatu, J., & Tirayoh, V. (2016) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan kabupaten minahasa sudah efisien dikarenakan pemerintah daerahnya sudah dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik.

Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah Aceh Tengah terhadap pemerintah pusat/provinsi masih sangat tinggi, dikarenakan sumber pendapatan asli daerah masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah belanja yang dikeluarkan sehingga pemerintah daerah masih membutuhkan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat/provinsi. Rata-rata perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan pusat/provinsi selama lima tahun hanya sebesar 13%. Tingkat pendapatan yang diterima pemerintah kabupaten Aceh Tengah yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi masih sangat tinggi, dan rata-rata hampir mencapai 100%. Pendapatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi

Khusus (DOK). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Aceh Tengah masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat/provinsi. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah Bener Meriah terhadap pemerintah pusat/provinsi juga sama seperti Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih sangat tinggi, Rata-rata perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan pusat/provinsi selama lima tahun hanya sebesar 8%. Tingkat pendapatan yang diterima pemerintah kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi masih sangat tinggi, dan rata-rata hampir mencapai 100%. pendapatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hasil penelitian ini tidak berbeda jauh dari hasil penelitian Yefirson (2015) dan Ichwan (2015). Dimana tidak terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan

1. Rasio kemandirian daerah kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah berada pada tingkatan rendah sekali dan dikategorikan kedalam pola instruktif. Nilai signifikansi uji beda rasio kemandirian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai rasio kemandirian antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Bener Meriah dimana Kabupaten Aceh Tengah memiliki rasio kemandirian lebih baik dibandingkan Kabupaten Bener Meriah.
2. Rasio efektivitas Kabupaten Aceh Tengah memiliki kriteria Cukup Efektif, sedangkan Kabupaten Bener Meriah memiliki kriteria Kurang Efektif. Nilai signifikansi uji beda rasio efektivitas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai rasio efektivitas antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Bener Meriah.
3. Rasio efisiensi pada kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah tergolong kedalam kriteria Efisien. Nilai signifikansi uji beda rasio efisiensi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai rasio efisiensi antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Bener Meriah.
4. Rasio ketergantungan daerah kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener meriah tergolong kedalam kriteria Sangat Tinggi. Nilai signifikansi

uji beda rasio ketergantungan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai rasio ketergantungan antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Bener Meriah.

Keterbatasan penelitian

Adanya kesamaan geografis dan sumber pendapatan asli daerah pada objek penelitian menjadi kekurangan penelitian ini sehingga penelitian ini tidak dapat dilakukan bersamaan terhadap kabupaten lainnya.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan diatas, saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah:

1. Pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah sebaiknya berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara melakukan revitalisasi pasar, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi bagi pemerintah, penyuluhan kepada memungut pajak agar lebih intensif dalam memungut pajak daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
2. Pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya dalam mengelola pendapatan daerahnya, seperti melakukan sosialisasi, pelatihan, maupun penyuluhan, terutama pada sektor pertanian, sektor pasar, dan sektor pariwisata.
3. Pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah diharapkan dapat menemukan sumber-sumber baru penerimaan daerah sehubungan dengan jumlah dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih cukup tinggi.
4. Pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD dengan cara memberikan bantuan maupun fasilitas kepada masyarakat pengelola terutama pada sektor pertanian.

Daftar Pustaka

Adhiantoko, H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Kabupaten Blora. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*.

Aswadi, K. (2014). Ketimpangan Pendapatan antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 35-40.

Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Harsonowati, D. (2013). *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Dilihat Dari Rasio Pendapatan Pada APBD* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Hendro, S. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Surakarta: Skripsi Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Ichwan, R., Rahman, B., & Maisyuri, M. (2018). Analisis Perbedaan Pad Kabupaten Aceh Utara Sebelum dan Setelah Pemekaran Dengan Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 3(3), 77-85.

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII, Yogyakarta.

Mahmudi. (2010). "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsum, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Ramadayani, R. (2018). Analisis Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Rempowatu, J., & Tirayoh, V. (2016). Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten minahasa selatan Tahun 2011-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sekaran, Uma & Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Edisi 6. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Wulandari, A. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 5(2), 17-33.

Yefirson, R. M., & Nasir, M. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekarannya di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(1).

Zafra-Gómez, J. L., López-Hernández, A. M., & Hernández-Bastida, A. (2009). Evaluating financial performance in local government: maximizing the benchmarking value. *International Review of Administrative Sciences*, 75(1), 151-167.